

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkotaan merupakan magnet bagi masyarakat untuk datang, beraktivitas, dan tinggal di dalamnya. Mengutip perkataan Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi dalam harian Kompas, mengatakan bahwa makin banyak penduduk perkotaan berarti makin banyak masyarakat yang berpeluang memperoleh infrastruktur yang baik. Kesejahteraan masyarakat perkotaan meningkat karena masyarakat kota memiliki peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat yang tinggal di desa (Haryadi, 2014)

Jumlah penduduk yang terus bertambah di DKI Jakarta menjadikan ibu kota negara ini mengalami dampak negatif kependudukan yang dapat dilihat dari meningkatnya pemukiman kumuh di beberapa wilayah perkampungan kota. Data yang bersumber dari BPS DKI Jakarta dalam SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 264 Rukun Warga (RW) dengan kondisi kumuh, 12 persen di antaranya masuk dalam kategori kondisi kumuh “berat” dan kumuh “sedang”.

Urbanisasi pada kota-kota besar seperti Jakarta mendorong timbulnya permasalahan perkotaan, di antaranya permasalahan pemukiman kota, yaitu munculnya pemukiman padat penduduk di kampung kota. Permasalahan pada pemukiman perkotaan yang biasa muncul adalah ketersediaan hunian layak huni yang semakin terbatas. Keterbatasan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kesediaan lahan untuk hunian. Keterbatasan kesediaan lahan untuk hunian membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar mengenai pengadaan bangunan rumah seperti kualitas material, jenis ruang, garis sempadan jalan, jarak antar rumah, dan faktor kesehatan (Surtiani, 2006). Keterbatasan kesediaan lahan juga berdampak pada bentuk dan dimensi hunian. Kepadatan dan keterbatasan pada kampung kota memberikan dampak bagi penghuninya untuk bertindak dan berperilaku. Semua ruang yang ada harus dioptimalkan pemanfaatannya. Ruang-ruang sirkulasi yang sempit dan terbatas sebagai ruang publik dimanfaatkan untuk menampung fungsi aktivitas lain yang dapat membentuk perilaku masyarakat (Nugroho: 2009).

Keberadaan kampung kota di Indonesia sudah dirintis mulai jaman penjajahan Hindia-Belada, sehingga sudah menjadi suatu budaya masyarakat kota untuk tinggal dengan sistem kampung kota. Heryati (2011) menyimpulkan bahwa kampung kota merupakan bentuk pemukiman wilayah perkotaan yang memiliki ciri masih adanya sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang dapat dilihat dari sistem kekerabatannya, kondisi fisik lingkungan yang kurang baik dan kurang teratur, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, sarana prasarana kurang memadai, seperti air bersih, saluran air limbah dan hujan, serta pembuangan sampah. Sifat kekerabatan yang masih kental dalam masyarakat kampung kota memberi dampak positif adanya komunikasi dan interaksi positif dengan intensitas tinggi pada masyarakat kampung kota. Namun sayangnya kondisi fisik dan sarana prasarana pada kampung kota dapat dikatakan masih terbatas karena ketidak seimbangan ketersediaan ruang serta infrastruktur yang dibandingkan dengan kepadatan jumlah penduduknya yang tinggi. Dalam kamus tata ruang, dalam Handayani (2009), kampung kota diartikan sebagai kelompok perumahan termasuk dalam bagian kota dengan kepadatan penduduk tinggi, dibangun secara informal, kurang sarana dan prasarana, serta dengan kepadatan yang tinggi dan cenderung terus terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Khudori (2002) menjelaskan bahwa kampung juga merupakan jenis pemukiman yang dapat menampung golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan perekonomian menengah ke bawah, meski tidak menutup kemungkinan juga menampung golongan yang lebih tinggi.

Pawitro (2012) menjelaskan bahwa terbentuknya kampung kota tidak dapat lepas dari kegiatan sosial-budaya masyarakatnya yang tinggal di daerah perkotaan. Kampung kota pada dasarnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sosial-budaya masyarakatnya yang tetap dipertahankan. Masyarakat kampung kota yang berasal dari "kampung" tempat tinggalnya walaupun telah berubah menjadi perkotaan. Budaya lama yang terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-harinya ini, mengakibatkan tatanan fisik cenderung tidak tertata dengan baik atau mengarah ke kondisi kumuh yang tidak teratur dengan kepadatannya yang tinggi. Meski demikian, kearifan penduduk dalam mempertahankan hubungan kekerabatan juga masih terus dijaga.

Kondisi masyarakat dengan kearifan lokal yang masih kental dalam sistem kekerabatan yang didukung oleh bentuk pemukiman kampung kota memunculkan banyaknya interaksi dan aktivitas sosial yang terbentuk. Keterbatasan ruang dalam lingkungan kampung kota merubah sifat ruang luar menjadi lebih publik dan terbuka.

Namun kenyataannya, kondisi ini tidak diimbangi dengan kurangnya fasilitas sarana atau wadah interaksi sosial dan aktivitas masyarakatnya. Keterbatasan ruang ini menimbulkan penumpukan fungsi koridor atau gang yang menjadi area sirkulasi sebagai area ruang luar dan ruang publik yang ditumpuk dengan fungsi-fungsi lain dalam ruang yang sama (*multy layer functions*). Pemanfaatan ruang fisik yang digunakan untuk berbagai aktivitas memunculkan adanya dinamika dalam penggunaan ruang.

Kampung Menteng Gang II RT 004 RW 10 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mengalami permasalahan kampung yang sama. Lokasi kampung yang berada di antara rel kereta api jalur Manggarai Tanah Abang dan sungai Ciliwung ini merupakan lokasi kampung kota dengan kepadatan tinggi. Jalanan yang sempit selebar 1,6 m dan padatnya rumah warga menjadikan lingkungan kampung tidak memiliki ruang khusus bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan melakuakn aktivitas bersama, seperti sarana bermain anak dan ruang kegiatan warga. Ruang publik informal yang dapat diakses secara bersama oleh masyarakat hanya berupa koridor gang.

Kondisi pemukiman kampung Menteng yang sangat padat, mengakibatkan jalan di lingkungan pemukiman baik jalan lingkungan maupun gang antara rumah yang sempit menjadi sarana milik publik yang masih tersisa. Jalan merupakan ruang luar yang masih tersisa untuk segala bentuk aktivitas diluar rumah. Jalan lingkungan memiliki berbagai fungsi yang bertumpuk untuk dapat memenuhi kebutuhan warga. Bukan hanya sebagai jalur sirkulasi kendaraan roda dua dan pejalan kaki, jalan di lingkungan ini menjadi area berkumpul, lokasi bermain anak, tempat bercengkrama para warga, tempat parkir, area jemur, dan area jual beli. Disinilah ruang aktivitas sosial terbentuk. Warga dapat berinteraksi satu sama lain meski dengan berbagai keterbatasan ruang fisik jalan.

Program penataan kampung kota oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya terbatas pada penataan lingkungan fisik dan kurang memperhatikan unsur perilaku masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan ruang fisik sebagai wadah ruang aktivitas yang terbentuk oleh adanya kebutuhan interaksi antar masyarakat, seharusnya dapat menjadi pertimbangan khusus dalam penataan kembali kampung kota. Hal ini berdasarkan pada kebutuhan interaksi sosial dan ruang aktivitas yang tinggi yang tidak didukung oleh ruang fisik yang memadai akibat keterbatasan lahan. Kenyataannya masyarakat banyak menghabiskan waktu di ruang luar

untuk melakukan berbagai aktivitas baik secara individu maupun dalam kelompok. Keterbatasan ruang fisik yang ada mengakibatkan ketidakteraturan ruang karena terjadi penumpukan fungsi ruang luar yang biasanya memiliki fungsi utama sebagai ruang sirkulasi. Kebutuhan akan interaksi sosial dan aktivitas mempengaruhi perubahan fungsi ruang menjadi fungsi lain sesuai kebutuhan (Najib: 2005).

Perlunya penataan kembali lingkungan sosial dan fisik kampung Menteng selain didasari oleh kondisi fisik dan sosial lingkungan di Kelurahan Menteng terutama di RW 10, historis kampung Menteng sebagai salah satu pusat pemukiman dan kampung tua di Jakarta yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, juga karena penunjukkan Kelurahan Menteng RW 10 sebagai sasaran Program Perbaikan Kampung yang dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2014. Kampung Menteng yang berada di lokasi yang strategis karena bersinggungan langsung dengan area pusat transportasi dan bisnis dengan kemudahan akses menjadi salah satu area yang diutamakan dalam penataan kampung kota karena diharapkan mampu menjadi area percontohan penataan kampung kota.

1.2. Identifikasi Masalah

- 1.2.1. Permasalahan perkotaan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas hunian beserta sarana dan prasarana yang memadai
- 1.2.2. Keterbatasan ruang fisik kampung kota padat penduduk
- 1.2.3. Ketidakteraturan hunian, ruang luar, dan sarana prasarana yang kurang memadai pada kampung kota
- 1.2.4. Interaksi dan aktivitas sosial masyarakat kampung kota yang tinggi namun terbatas oleh wadah interaksi dan aktivitas sosial karena kondisi fisik lingkungan
- 1.2.5. Koridor kampung kota sebagai satu-satunya ruang publik dan area aktivitas personal dan komunal warga sehari-hari
- 1.2.6. Penataan kampung kota yang hanya berdasar pada kondisi fisik lingkungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan akan ruang aktivitas dan interaksi sosial masyarakat yang tinggi

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana ruang pembentuk aktivitas pada koridor kampung kota di gang II RW 10 Kelurahan Menteng?

1.4. Batasan Masalah

Lingkup permasalahan dibahas dalam kajian ini bertujuan untuk memfokuskan topik bahasan dan objek perancangan sehingga tidak meluas. Adapun batasan-batasan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, batasan permasalahan yang difokuskan pada koridor gang kampung kota sebagai seting ruang pembentuk aktivitas masyarakat.

Kedua, batasan wilayah kajian meliputi koridor gang II RW 10 yang terdiri dari RT 012, 006, dan 004, Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Madya Jakarta Pusat. Batas wilayah lokasi kajian di sebelah selatan terdapat Sungai Ciliwung dan di sebelah utara dibatasi oleh rel kereta api.

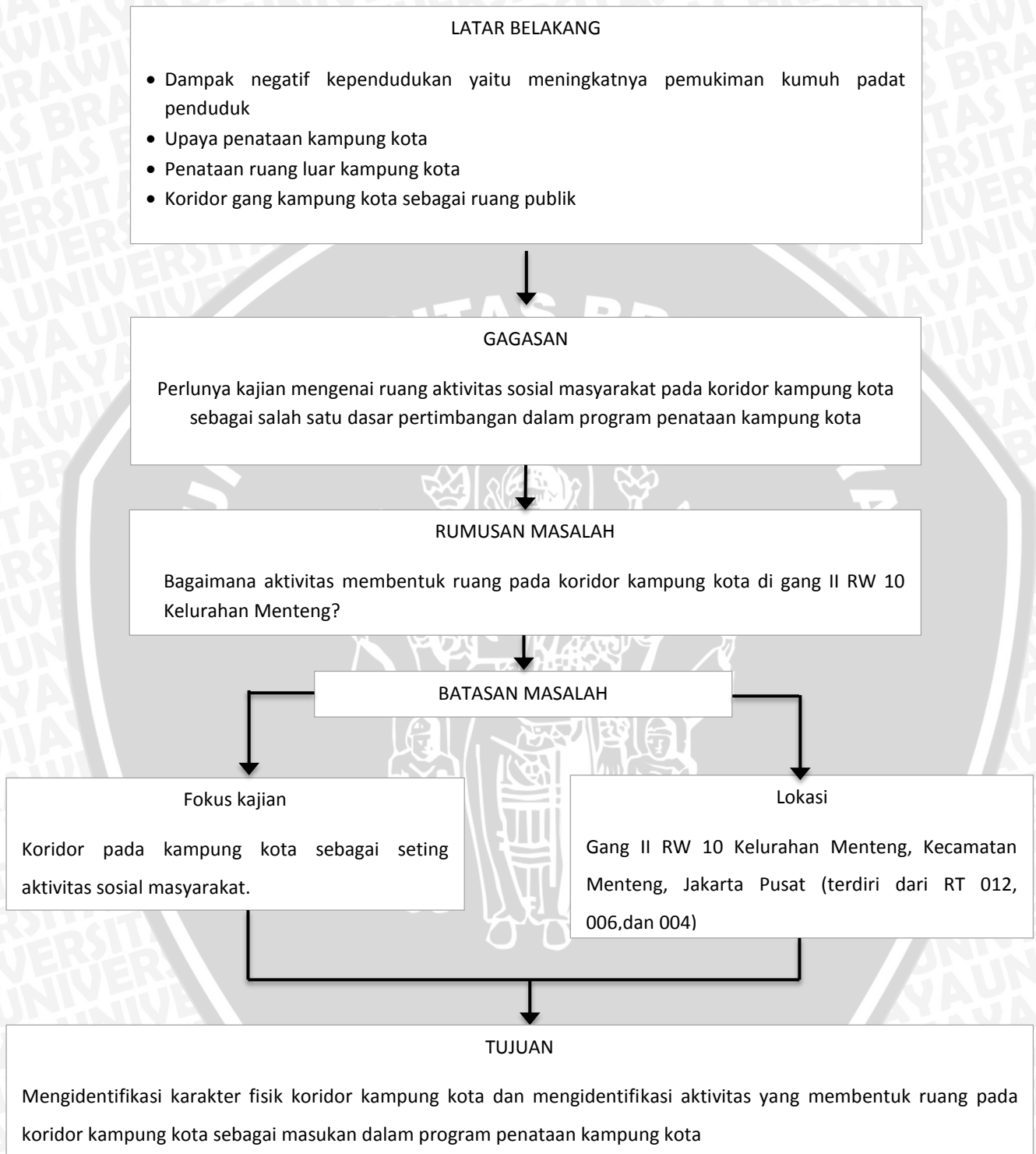
1.5. Tujuan Kajian

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakter fisik koridor kampung kota dan ruang pembentuk aktivitas pada koridor kampung kota sebagai masukan dalam program penataan kampung kota.

1.6. Kontribusi Kajian

- A. Sebagai pertimbangan kriteria desain dalam program penataan kampung kota padat penduduk agar tidak terbatas pada penataan kampung kota secara fisik saja.
- B. Sebagai masukan bagaimana menata kampung kota yang juga mempertimbangkan kondisi aktivitas dan interaksi sosial masyarakat sehingga dapat diwadahi dengan baik.

1.7. Kerangka Pikir (Gambar 1.1)



Gambar 1.1 Kerangka pikir